PUSAT

PUSAT+ UNIT

UNIT

				Penilaian	Bobot
Α.	PRO		•		
	I.	MA	_	JEMEN PERUBAHAN (5)	5.00
		1	Tir	n Reformasi Birokrasi (1)	0.50
			a.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk	
			b.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab	
				Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas	
				sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	
			c.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	
		2	Ro	ad Map Reformasi Birokrasi (1)	0.50
			a.	Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	
			b.	Road Map telah mencakup 8 area perubahan	

		c.	Road Map telah mencakup "quick win"	
		d.	Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi	
		e.	Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi	
	3	Pe	mantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2)	1.00
		a.		
		b.	Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja	
		1		

		d.	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
		e.	Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?	
		f.	Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?	
		g.	Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	
	4	Pe	rubahan pola pikir dan budaya kinerja (1)	0.50
		a.	Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	
		b.	Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	

		c.	Terdapat upaya untuk menggerakkan	
		.	organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan	
			melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun	
			role model	
II.	PEN	_	AAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)	5.00
	1	На	rmonisasi (2,5)	1.25
		a.	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan	
			pemetaan terhadap peraturan perundang-	
			undangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan	
			direvisi/dihapus	
		b.	Telah dilakukan revisi peraturan perundang-	
			undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	
	2	Sic	l tem pengendalian dalam penyusunan peraturan	2.50
	-		rundang-undangan (2,5)	2.30
		а .	I	
			peraturan perundangan yang mensyaratkan	
			adanya Rapat Koordinasi, Naskah	
			Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf	
			Koordinasi	
		b.		
			pengendalian penyusunan peraturan perundang- undangan	
			and angair	
III.	PEN	TAI	AAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6)	6.00
	1.	Ev	aluasi (3)	1.50

	a.	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	
	b.	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	
	c.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	
	d.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	
	e.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	
	f.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan	
	g.	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	

		h.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis	
			kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan	
			instansi lain	
		i.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis	
			kemampuan struktur organisasi untuk adaptif	
			terhadap perubahan lingkungan strategis	
	2.	Pe	nataan (3)	3.00
		a.	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan	
			mengajukan perubahan organisasi	
			and the second of the second o	
IV.	PEN	VAT	AAN TATALAKSANA (5)	5.00
	1		oses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	0.625
	_		giatan utama (1,5)	3.023
		a.	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai	
			dengan tugas dan fungsi	
		b.	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam	
		~.	prosedur operasional tetap (SOP)	
		c.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	
			(50.7, 50.50.00,	
		d.	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah	
			dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan	
			tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	
			tantatan ensiensi, aan erektivitas birokrasi	
				l

	_	_		
		e.	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai	
			dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan	
			Kinerja Organisasi secara berjenjang	
	2	E-C	Government (2)	0.75
		a.	Sudah memiliki rencana pengembangan e-	
			government di lingkungan instansi	
		b.	Sudah dilakukan pengembangan e-government di	
			lingkungan internal dalam rangka mendukung	
			proses birokrasi (misal: intranet, sistem	
			perencanaan dan penganggaran, sistem data base	
			SDM, dll)	
	3	Ke	terbukaan Informasi Publik (1,5)	0.625
		a.	Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan	
			informasi publik (identifikasi informasi yang dapat	
			diketahui oleh publik dan mekanisme	
			penyampaian)	
		b.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan	
			kebijakan keterbukaan informasi publik	
	4	Ku	alitas Pengelolaan Arsip	1.00
		a.	Hasil Pengawasan Kearsipan	
V.	PEN	IAT	AAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)	15.00
	1	Pe	rencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan	0.50
			butuhan organisasi (1)	
		a.	Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan	
			diformalkan	
		b.	Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan	
			diformalkan	
		-		

			Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	
		u.	sesuai kebutuhan unit kerja	
	2		oses penerimaan pegawai transparan, objektif, untabel dan bebas KKN (2)	2.00
		a.	Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat	
		b.	Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (<i>online</i>)	
		c.	Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	
		d.	Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	
		e.	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	
	3	Pe	ngembangan pegawai berbasis kompetensi (1)	0.50
		a.	Telah ada standar kompetensi jabatan	
		b.	Telah dilakukan asessment pegawai	

	5	Do	terbuka netapan kinerja individu (2)	1.00
		e.	Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara	
		d.	Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	
		c.	Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif	
		υ.	telah dilaksanakan	
		a. b.	Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi	
	4		omosi jabatan dilakukan secara terbuka (6)	6.00
	_			
		e.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	
		d.	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	
		c.	Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi	

		a.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya	
		b.	Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	
	•	Da		0.50
	6	ı	negakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku gawai (1)	0.50
		a.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan	
		b.	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	
		C.	Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward)	
_	7	Pe	laksanaan evaluasi jabatan (1)	0.50
		a.	Informasi faktor jabatan telah disusun	
		b.	Peta jabatan telah ditetapkan	

		c.	Kelas jabatan telah ditetapkan Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ	
	8.	Sis	tem Informasi Kepegawaian (1)	0.50
		a.	Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan	
		b.	Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan	
			Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	
VI.		_	JATAN AKUNTABILITAS (6)	6.00
	1	Ke	terlibatan pimpinan (2)	1.00
		a.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	
		b.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	
		c.	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	
	2	Pe	ngelolaan Akuntabilitas Kinerja (4)	2.00

	a.	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	
	b.	Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun	
	C.	Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik	
	d.	Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit	
VII. F	DENIGI	JATAN PENGAWASAN (12)	12.00
V 11. 1	LIVU	57(17(14) E146)(14)(12)	12.00
 		ratifikasi (1,5)	0.75
 			
 	1 Gr	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	
 	1 Gr a.	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	
 	1 Gr a. b.	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi Telah dilakukan <i>public campaign</i>	
 	1 Gr a. b.	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi Telah dilakukan <i>public campaign</i> Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	
 	1 Gr a. b. c. d.	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi Telah dilakukan public campaign Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	
 	1 Gr a. b. c. d.	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi Telah dilakukan public campaign Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat	
 	1 Gr a. b. c. d.	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi Telah dilakukan public campaign Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	

	1	- Lainnya		
	+	b. Jumlah yang sudah melaporkan		
	2	Penerapan SPIP (1,5)		
	_	a. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi		
		tentang SPIP		
		o. Maturitas SPIP		
	3	Pengaduan Masyarakat (2)		
	_	a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	1.00	
	_	Whistle-Blowing System (1,5)		
	_	a. Telah terdapat Whistle Blowing System	0.75	
	-	<u> </u>		
		D. Whistle Blowing System telah disosialisasikan		
		c. Whistle Blowing System telah diimplementasikan		
		d. Telah dilakukan evaluasi atas <i>Whistle Blowing</i>		
		System		
		e. Hasil evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i> telah		
		ditindaklanjuti		
!	5	Penanganan Benturan Kepentingan (1,5)	0.75	
		a. Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan		
	6	Pembangunan Zona Integritas (2,5)	1.25	
		a. Telah dilakukan pencanangan zona integritas		
		o. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan		
		menjadi zona integritas		
		c. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang		
		telah ditentukan		
		d. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai		
		"menuju WBK/WBBM"		

	7	Ар	arat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5)	1.50
		a.	Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	
		b.	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.	
		c.	APIP didukung dengan anggaran yang memadai	
		d.	APIP berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko	
		e.	Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)	
VIII.	PEI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6)		
	1	Sta	andar Pelayanan (1)	0.50
		a.	Terdapat kebijakan standar pelayanan	
	2	Bu	daya Pelayanan Prima (1)	0.50

		a.	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)		
		b.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		
		c.	Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		
		d.	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		
		e.	Terdapat inovasi pelayanan		
	3	Pe	Pengelolaan Pengaduan (1,5)		
	4	_	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5)		
	5	Pe	manfaatan Teknologi Informasi (1)	0.50	
		a.	Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan		
		b.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan		
		c.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus		

TOTAL PENGUNGKIT						
В.	SIL (4	10)				
	I.	KAF	PAS	ITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20	20.00	
		1.	Nil	ai Akuntabilitas Kinerja (14)	14.00	
		2.	Nil	ai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6)	6.00	
	II.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)			10.00	
		1. Nilai Pe		ai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7)	7.00	
		2.	Ор	Opini BPK (3)		
	III.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)		10.00		
		1.	Nil	ai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10	10.00	
	TOTAL HASIL					
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI					100.00	

Pusat

Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
			2.50	50.00%
			0.50	100.00%
a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi	A/B/C	А	1	
a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja	A/B/C/D	А	1	
a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	A	1	
			0.50	100.00%
Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/Tidak	Ya	1	
a. 4 area atau lebih b. 1-3 area c. tidak ada	A/B/C	А	1	

a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat c. Belum ada quick win	A/B/C	А	1	
a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map	A/B/C/D	А	1	
a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map	A/B/C/D	А	1	
			1.00	100.00%
a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	A/B/C/D	А	1	
a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi d. Seluruh akktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi	A/B/C/D	А	1	
a. Seluruh Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan				

a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB. b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB. c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.	A/B/C/D	А	1	
a. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi b. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi c. Koordinator assessor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi	A/B/C	А	1	
 a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas; c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator assessor 	A/B/C	А	1	
a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A/B/C	А	1	
			0.50	100.00%
a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	А	1	
a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi	A/B/C/D/E	A	1	

a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change	A/B/C/D	А	1	
general desired and the second			3.75	75.00%
			1.25	100.00%
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis/sinkron b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis/sinkron c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	A/B/C	А	1	
a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	A/B/C	А	1	
			2.50	100.00%
a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan d. Belum ada persyaratan tersebut	A/B/C/D	А	1	
a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	A/B/C	А	1	
			4.50	75.00%
			1.50	100.00%

a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi				
kepada seluruh unit organisasi				
b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	A/B/C	Α	1	
kepada sebagian unit organisasi	. , ., .	, ,	_	
c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi				
kepada unit organsiasi				
a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi				
b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi	A/B/C	Α	1	
c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi				
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit				
kerja				
b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit	A/B/C	Α	1	
kerja				
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja				
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun				
ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja				
b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun	A/B/C	А	1	
ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja	A/b/C	A	1	
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun				
ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja				
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada				
lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja				
b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada	A/B/C	А	1	
lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja	A/b/C	A	1	
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor				
kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja				
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang				
akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja				
b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang	A/B/C	۸	1	
akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja	A/B/C	А	1	
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang				
akan dihasilkan kepada unit kerja				
a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh				
unit kerja				
b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada sebagian	A/B/C	Α	1	
unit kerja				
c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada unit kerja				

Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya/Tidak	Ya	1	
Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya/Tidak	Ya	1	
			3.00	100.00%
a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	A/B/C/D	А	1	
			3.00	60.00%
			0.625	100.00%
a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	A/B/C/D	А	1	
a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	A/B/C/D	А	1	
a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)	A/B/C/D	А	1	
a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A/B/C/D	А	1	

 a. Seluruh tugas dan fungsi telah dipetakan dalam Peta proses bisnis b. Sebagian besar tugas dan fungsi telah dipetakan dalam Peta proses bisnis c. Sebagian kecil tugas dan fungsi telah dipetakan dalam Peta proses bisnis d. Belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi 	A/B/C/D	A	1	
			0.75	100.00%
Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya/Tidak	Ya	1	
a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d.Belum ada pengembangan dan implementasi e-government	A/B/C/D	А	1	
			0.625	100.00%
Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya/Tidak	Ya	1	
a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A/B/C	А	1	
			1.00	100.00%
Penilaian menggunakan Hasil Pengawasan Kearsipan (Perka ANRI Nomor 38/2015)	Indeks (0-100)	100	1	
			11.50	76.67%
			0.50	100.00%
ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai	Ya/Tidak	Ya	1	
ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun	Ya/Tidak	Ya	1	

a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan	A/B/C/D	А	1	
a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A/B/C/D	А	1	
		2.000	2.00	100.00%
 a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb) b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor) c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan 	A/B/C	А	1	
Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.	Ya/Tidak	Ya	1	
Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.	Ya/Tidak	Ya	1	
Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Ya/Tidak	Ya	1	
Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah	Ya/Tidak	Ya	1	
		0.500	0.50	100.00%
Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan	Ya/Tidak	Ya	1	
a. Telah dilakukan asessment kepada seluruh pegawai b. Telah dilakukan asessment kepada sebagian besar pegawai c. Telah dilakukan asessment kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan assessment pegawai	A/B/C/D	А	1	

			1.00	100.00%
Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb	Ya/Tidak	Ya	1	
Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen	Ya/Tidak	Ya	1	
Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif	Ya/Tidak	Ya	1	
terbuka secara nasional b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi	A/B/C/D	А	1	
a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi	ra/ Huak	Ta	1 1	
ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan	Ya/Tidak	6.000 Ya	6.00	100.00%
c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi				400 000
a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala	A/B/C	А	1	
anggaran yang mencukupi d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A/B/C/D	A	1	
a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi b.Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan	A/B/C/D	А	1	

a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai	A/B/C/D	А	1	
a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawai d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai	A/B/C/D	А	1	
			0.50	100.00%
ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku	Ya/Tidak	Ya	1	
a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	A/B/C	А	1	
a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian besar unit organisasi c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian kecil unit organisasi d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada unit organisasi	A/B/C/D	А	1	
			0.50	100.00%
Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan	Ya/Tidak	Ya	1	
a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatanb. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatanc. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatand. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan	A/B/C/D	А	1	

 a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan 	A/B/C/D	А	1	
a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ d. Evaluasi Jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan	A/B/C/D/E	А	1	
		0.500	0.50	100.00%
Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	Ya/Tidak	Ya	1	
a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistrm Informasi Kepegawaian c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian d. Seluruh unit organsiasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian	A/B/C/D	А	1	
Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya/Tidak	Ya	1	
			3.00	50.00%
			1.00	100.00%
a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A/B/C/D	А	1	
a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A/B/C/D	А	1	
a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A/B/C/D	А	1	
			2.00	100.00%

kinerja b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja berbasi elektronik dalam kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja berbasi diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja berbasi diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja berbasi diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem			1		1
b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja berb	a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas				
akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diak					
c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Va. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Ya. apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja A. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. A/B/C/D A 1 A/B/C/D A					
akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja A. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Paya papabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi Ya/Tidak Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi A/B/C A 1 Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Ya 1 Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/a pabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/a pabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak Ya 1 Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999	·	A/B/C/D	Α	1	
d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja Xa, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik kalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh					
akuntabilitas kinerja Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. A/B/C/D A 1 a. Public campaign telah dilakukan tentang penanganan gratifikasi Ya/Tidak Ya 1 Ya/Tidak Ya 1 Ya/Tidak Ya 1 Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999					
Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh selarut organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh selarut organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh selarut organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh selarut organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh selarut organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh selarut organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh selarut organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh selarut organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh selarut organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh selarut organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh selarut organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh selarut organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh selarut organisasi d. Sistem					
a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja belum dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi v. Sistem Pengukuran Kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi v. Sistem Pengukuran Kinerja belum dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi v. Sistem Pengukuran Kinerja belum dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi v. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi v. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi v. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi v. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi v. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi v. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi va/B/C/D A 1 1 4 A/B/C/D A 1 4 A/B/C A 1	,				
b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organi	Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja	Ya/Tidak	Ya	1	
c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem Pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. A/B/C/D A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi				
c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sebagian Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sebagian Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sebagian Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi d. Sebagian Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh unit organisasi d. Sebagian Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh unit organisasi d. Sebagian Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh unit organisasi d. Sebagian Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh unit organisasi d. Sebagian Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh unit organisasi	b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi	A /D /C /D		4	
a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi	c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi	A/B/C/D	A	1	
b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi	d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik				
c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi	a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi				
c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi C. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi C. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi C. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi C. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi C. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi Ya/Tidak Ya 1 Ya/Tidak Ya 1 Ya/Tidak Ya 1 Ya/Tidak Ya 1 Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Xa 6.75 56.25% A 78 A/B/C A 1 Ya/Tidak Ya 1 Xa/Tidak Ya 1 Xa/Tidak Ya/Tidak Ya 1 Xa/Tidak Ya/Tidak Ya 1	b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi	A /D /C /D		4	
Sewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 20.75 56.25% 6.75 56.25% 6.75 56.25% 6.75 56.25% 6.75 56.25% 6.75 56.25% 6.75 56.25% 6.75 56.25% 6.75 56.25% 6.75 56.25% 6.75 56.25% 6.75 56.25% 6.75 56.25% 6.75 56.25% 6.75 56.25% 6.75 56.25% 6.75 56.25% 6.75 56.25% 6.75 6.75 6.25% 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.25% 6.75 6.25% 6.75 6.	c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi	A/B/C/D	A	1	
Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya/Tidak Ya 1 Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Ya 1 Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Na/Tidak	d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi				
Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Xewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 % 100.00% 1.00				6.75	56.25%
a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 % 100.00% 1.00				0.75	100.00%
b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak Ya/Tidak Ya 1 Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 % 100.00% 1.00	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi	Ya/Tidak	Ya	1	
c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Ya 1 Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak Ya 1 Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 % 100.00% 1.00	a. Public campaign telah dilakukan secara berkala				
Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Ya 1 Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak Ya 1 Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 % 100.00% 1.00	b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala	A/B/C	Α	1	
Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak Ya 1 Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 % 100.00% 1.00	c. Belum dilakukan public campaign				
Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak Ya/Tidak Ya 1 Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 % 100.00% 1.00	Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi	Ya/Tidak	Ya	1	
Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 % 100.00% 1.00	Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Va /Tidak	Va	1	
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 % 100.00% 1.00		fa/ Huak	i id	1	
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 % 100.00% 1.00	Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya/Tidak	Ya	1	
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 % 100.00% 1.00	Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:				
70 100,0070 1100	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0 /_	100 00%	1.00	
LE ONGOIS ONGOIS NO. JU TAITAIT 2002	2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002	/0	100.00%	1.00	
2 Undang Undang No. 10 Tahun 2015					
Jumlah 1		Jumlah	1		
Jumlah 1		Jumlah	1		

	Jumlah	1		
			0.75	100.00%
Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya/Tidak	Ya	1	
Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP (Perka BPKP Nomor 4/2016)	Skor (Skala 5)	5	1.00	
			1.00	100.00%
Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan	Ya/Tidak	Ya	1	
			0.75	100.00%
Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System	Ya/Tidak	Ya	1	
 a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi 	A/B/C/D	А	1	
Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan	Ya/Tidak	Ya	1	
a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkalab. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkalac. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System	A/B/C	А	1	
a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1	
			0.75	100.00%
Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	Ya/Tidak	Ya	1	
			1.25	100.00%
Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan	Ya/Tidak	Ya	1	
Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan	Ya/Tidak	Ya	1	
a.Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Zona integritas yang telah ditentukan belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	А	1	
a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK	A/B/C	А	1	

			1.50	100.00%
a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir	A/B/C/D	А	1	
a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas	A/B/C/D	А	1	
a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran	A/B/C/D	А	1	
a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko	A/B/C/D	А	1	
Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (Perka BPKP Nomor 16/2015)	Level (Skala 5)	5	1.00	
			1.50	25.00%
			0.50	100.00%
Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan	Ya/Tidak	Ya	1	
			0.50	100.00%

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	A/B/C/D	А	1	
 a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media 	A/B/C	А	1	
a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C	А	1	
a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu	A/B/C/D	А	1	
Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan	Ya/Tidak	Ya	1	
			0.50	100.00%
Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya/Tidak	Ya	1	
a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	A/B/C/D	А	1	
a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A/B/C	А	1	

			36.50	
			20.00	100.00%
Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	0-100	100.00	14.00	100.00%
Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi	0-5	5.00	6.00	100.00%
			10.00	100.00%
Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi	0-4	4.00	7.00	100.00%
Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP/WTP- DPP/WDP/TM P/TW/Tidak Ada Laporan	WTP	3.00	100.00%
			10.00	100.00%
Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	0-4	4.00	10.00	100.00%
			40.00	100.00%
			#REF!	#REF!

Catatan/Keterangan/ Penjelasan				

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 ·	·	
